

DAMPAK INVESTASI INFRASTRUKTUR CHINA KE INDONESIA

Dyana Novita Ningsih

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Presiden Joko Widodo's ambition to attract infrastructure investment meets China's interest which massively penetrate countries around the world. For Indonesia, China invests relatively big amount of money for financing the infrastructure project, beside it is demanding to loosen lots of regulation on foreign worker. This article is analyzing the impact of the China's investment in Indonesia toward the governance of the foreign workers during the period of President Joko Widodo Administration. The research conducted with qualitative method particularly the case study to analyze a sequential cases in the field. Result of this research shows that the relatively massive number of China's investment impacts the governance of the foreign worker in Indonesia. This conclusion comes from the indication that the Joko Widodo Administration tend to loose the Indonesian foreign worker regulations, as well as being less assertive in handling varous immigration cases which related with Chinese foreign workers. Moreover, the Jokowi administration has changed lots of regulations despite it has conflicting issues with the Law on Foreign Worker. On the other hand, the Parliament's Special Committee on the Foreign Worker Issue has recommended the Jokowi Administration to pay more serious attention on cases related to the Chinese workers.

Abstrak: Ambisi Presiden Joko Widodo untuk menarik investasi infrastruktur memenuhi kepentingan Cina yang secara besar-besaran menembus negara-negara di seluruh dunia. Untuk Indonesia, Cina menginvestasikan jumlah uang yang relatif besar untuk membiayai proyek infrastruktur, di samping itu menuntut untuk melonggarkan banyak peraturan tentang pekerja asing. Artikel ini menganalisis dampak dari investasi Cina di Indonesia terhadap tata kelola pekerja asing selama periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif khususnya studi kasus untuk menganalisa suatu kasus yang berurutan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah investasi Cina yang relatif besar berdampak pada tata kelola pekerja asing di Indonesia. Kesimpulan ini berasal dari indikasi bahwa Pemerintahan Joko Widodo cenderung kehilangan peraturan pekerja asing Indonesia, serta kurang tegas dalam menangani kasus-kasus imigrasi varasional yang berhubungan dengan pekerja asing Cina. Selain itu, pemerintahan Jokowi telah mengubah banyak peraturan meskipun memiliki masalah yang bertentangan dengan UU tentang Pekerja Asing. Di sisi lain, Komite Khusus Parlemen tentang Masalah Pekerja Asing telah merekomendasikan Pemerintahan Jokowi untuk memberikan perhatian yang lebih serius pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pekerja Cina.

Kata Kunci: investasi infrastruktur, regulasi pekerja asing, pekerja asing Cina

PENDAHULUAN

Pelemahan ekonomi Indonesia¹ adalah realita yang harus dihadapi saat ini. Walaupun melemahnya ekonomi adalah akibat dari faktor luar dan dalam dari dinamika ekonomi Indonesia, efek terhadap rakyat tanpa disadari terus terasa. Efek-efek ini termasuk peningkatan tingkat kurs rupiah pada mata uang dunia lainnya, fluktuasi harga pangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah demi menjaga roda perusahaan terus

berjalan. Di antara isu ekonomi melemah ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan datangnya ribuan tenaga asing dari negara tetangga. Tingginya arus tenaga asing yang datang dari negara tetangga ke Indonesia ini, terutama China, tidak diantisipasi oleh masyarakat. Walaupun angkanya masih simpang siur, sekurang-kurangnya terdapat 5.000 orang buruh yang kini baru tercatat di Indonesia. Kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini masih memiliki tingkat populasi yang cukup signifikan menganggur, menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2015 adah 7,45 juta jiwa dari 240 juta popilasi dan 129 juta angkatan kerja. Selain itu disebut juga bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) didomi-

¹ Aulia Natasya Irfani Ampri, *Bombardir Masuknya Tenaga Kerja Asing :Apakah kita siap?*-<http://bemfeui.com/official/bombardir-masuknya-tenaga-kerja-asing-ke-indonesia-apakah-kita-siap/>, diakses 20 Februari 2018, pkl. 08.02 WIB

nasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,05% disusul jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 8,17%, dan Diploma I/II/III sebesar 7,49%.

Indonesia masih memiliki masalah dalam ketimpangan kompetensi. Jika dibandingkan secara kasar, pekerja lulusan Sekolah Dasar (SD) meliputi 45,13% dari populasi, sedangkan tenaga kerja ditingkat Sarjana ke atas hanya 8,29%. Ketimpangan kompetensi pekerja ini membuat tenaga kerja sangat rentan dengan isu-isu dan membutuhkan proteksi dan memerlukan kesempatan kerja yang lebih luas.

Kabar bahwa adanya kedatangan tenaga kerja dari China ke Indonesia telah dibenarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Kementrian Ketenagakerjaan mengakui bahwa mereka telah menerbitkan setidaknya 41 ribu Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sejak Januari 2014 hingga Mei 2015. Walaupun Menteri Hanif menegaskan bahwa secara keseluruhan jumlah pekerja China ini kurang dari 0,1 persen dari jumlah total buruh lokal Indonesia, kedatangan buruh impor ini menancam terutama buruh kelas bawah. Pekerja-pekerja China ini biasa bekerja di proyek investasi yang memang bekerjasama dengan pihak dari negara Panda, seperti proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali yang diadakan oleh China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering, Co. Ltd, PT CT 17, mitra lokal PT General Energy Bali dan pembangunan pabrik semen PT Cemindo Gemilang di Bayah, Banten.

Pelanggaran karena penegakan hukum yang kurang baik masih terjadi di Indonesia dan bukanlah hal yang asing di ranah kita. Di proyek-proyek investasi China tersebut saja banyak diantara mereka yang mengakui masuk dari cara calo ilegal dan memainkan peraturan yang telah dibuat oleh Kemennaker. Lebih dari itu, perusahaan yang berinvestasi dari China ini juga banyak yang membawa paket lengkap langsung dari negeri China, termasuk peralatan proyek dan pekerja dari level top manager, operator, hingga pekerja kasar tidak terdidik seperti buruh. Pekerja lokal seolah kurang dilibatkan dengan alasan keefektifan komunikasi

dan dianggap ada hanya untuk memenuhi syarat investasi di Indonesia.

Indonesia dan China berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara pertumbuhan berkelanjutan, stabil dan cepat, kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral ditingkatkan. Oleh karena itu, kerjasama kedua negara tersebut diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Pada bulan Maret 2012, sebagaimana telah disepakati dalam pernyataan bersama antara Republik Rakyat China dan Republik Indonesia, pemerintah China dan Indonesia setuju untuk mengembangkan Program Pengembangan Lima Tahun antara Indonesia China untuk Kerjasama di Bidang Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi 2013–2017 sesuai dengan Rencana Lima Tahun ke – 12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat China dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Republik Indonesia.

Menurut Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), China menyiratkan dana proyek-proyek infrastruktur di Indonesia antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). China juga terlibat dalam pembangunan jalur kereta cepat Jakarta–Bandung, setelah pemerintah Indonesia memberikan daftar proyek-proyek yang diperuntukkan bagi para investor China.²

Xie Feng, Duta Besar China untuk Indonesia, mengatakan, kerjasama pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan hasil kesepakatan pemimpin kedua negara dalam mensinergikan strategi pengembangan. Dalam waktu satu tahun, Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo telah tiga kali melakukan kunjungan timbal balik dan dua kali

² Jurnal Hubungan Internasional, “Konsep Bantuan Luar Negeri China ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing China)” Vol. 5 Edisi 1 APRIL 2011, hlm. 58.

melakukan pembicaraan telepon. Pemimpin kedua negara sepakat untuk mensinergikan inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad 21 dan strategi Poros Maritim Dunia melalui perluasan kerjasama pragmatis di berbagai bidang,” jelas Xie Feng.³

Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Rini Soemarno sudah memiliki rencana kerjasama selanjutnya dengan China. Usai kereta cepat Jakarta–Bandung, kerjasama kedua negara akan tertuju pada industri aluminium dengan nilai Investasi 1,6 miliar Dollar Amerika Serikat. Yang saat ini sedang dalam proses pembangunan proses aluminium grade alumina di Mempawah (Kalimantan Barat).⁴ Kerjasama tersebut sebagai tindak lanjut dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. PT Aneka Tambang (Antam) nantinya akan menjadi partner perusahaan China. Produk aluminium yang dihasilkan akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan gerbong kereta cepat. Selain itu, aluminium akan diproyeksikan untuk bahan baku pembuatan gerbong kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT).

Indonesia akan menjalin kerjasama dengan China untuk membangun smelter dan pembangkit listrik tenaga air di Membrano, Papua. Selain itu (Menteri Kemaritiman Indonesia) Luhut Panjaitan dan (Dewan Negara RRT) Yang Jiechi juga membicarakan mengenai rencana mendirikan joint company terkait pemanfaatan sumber daya ikan laut di perairan Indonesia.⁵ Perluasan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan China juga ditandai dengan adanya beberapa perjanjian kontrak kerjasama

dan penandatanganan Memorandum of Understanding, dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Beijing bertemu dengan Presiden Xi Jinping untuk melakukan pembicaraan bilateral pada Maret 2015. Mengambil tema Kemitraan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk membawa Kemitraan Strategis Komprehensif dalam kerja nyata yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan China.

Fokus pembicaraan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping kali ini terkait upaya peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, dan pariwisata. Secara khusus Presiden Joko Widodo mengundang China untuk semakin meningkatkan arus investasi langsung di Indonesia di berbagai bidang. Hasil pertemuan bilateral kedua delegasi pemerintahan itu dituangkan dalam Statement Bersama Kemitraan Strategi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintahan China (China).⁶

Regulasi proteksi pekerja Indonesia saat ini, Indonesia terus membuka keran investasi untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri telah menyampaikan bahwa berbagai deregulasi dan usaha sengaja dibuat agar iklim berinvestasi di Indonesia lebih kondusif. Indonesia telah lebih mendetailkan prasyarat tenaga kerja asing yang ingin bekerja dengan mengeluarkan Permenaker no. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Permenaker ini, dicantumkan berbagai regulasi yang mengetatkan dan membebaskan penggunaan TKA. Pasal 3 Permenaker no. 16 tahun 2015 mencantumkan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan satu orang TKA wajib memberi kerja sekurang-kurangnya 10 tenaga kerja Indonesia.

³ Andylala Waluyo (Voa Indonesia), “BUMN Indonesia, China Resmikan Kerjasama Pembangunan Kereta Cepat” dalam <http://www.voaindonesia.com/a/konsorsium-bumn-indonesia-jalinkerjasama-dengan-china-bangun-kereta-cepat/3009880.html>, diakses pada tanggal 20 02 2018 pukul 23.42 WIB

⁴ Harian Kompas, “Setelah KA Cepat, Rini Ajak China Kerja Sama di Industri Aluminium” dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/22/094900026/Setelah.KA.Cepat.Rini.Ajak.China.Kerja.Sama.di.Industri.Alumunium>, diakses pada tanggal 20 02 2018, pukul 00.14

⁵ Harian Kompas, “Indonesia-China sepakat tingkatkan kerjasama dibidang ekonomi” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/20102091/Indonesia.China.Sepakat.Tingkatkan.Kerja.Sama.di.Bidang.Ekonomi>, diakses pada tanggal 20 02 2018, pukul 00.28 WIB

⁶ Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Disaksikan Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping, RI –RRT Tandatangani 8 Kerjasama” dalam <http://setkab.go.id/presiden-rrt-xi-jinping-sambutpresiden-jokowi-dengan-upacara-kenegaraan/>, diakses pada tanggal 20 02 2018, pukul 01.08 WIB

METODE

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk memilih konsep yang tepat dalam membentuk hipotesa, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Penulis menggunakan salah satu teori yaitu teori kerjasama internasional dalam menganalisis alasan Indonesia memilih China sebagai investor dalam bidang infrastruktur. Perspektif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah perspektif liberalisme. Kaum liberal mempunyai pandangan tentang organisasi ekonomi masyarakat, misalnya: yakni kita bisa mengenali suatu pembagian dalam pemikiran liberal antara mereka yang berpolitik “sayap kanan”, yang percaya bahwa kebebasan individu harus di perluas kedalam ranah wilayah ekonomi. Sebaliknya, kaum liberal “sayap kiri” menyatakan bahwa prinsip-prinsip kebebasan politik dan persamaan hak bisa terancam oleh sentralisasi kekuasaan ekonomi dan kekayaan. Banyak sekali inovasi-inovasi dalam teori liberal dan teori tersebut tercermin dalam hubungan Internasional. Contohnya, pendekatan idealisme, interdependensi, transnasionalisme, internasionalisme, liberal, teori perdamiaian liberal, institusionalisme neo-liberal dan masyarakat dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi Infrastruktur China di Indonesia

Pinjaman Bidang Infrastruktur Investasi asing China di Jawa Barat yang mencakup dua proyek besar yang mendapatkan “Financial Investment” atau Loan. Pertama, Waduk Jatigede-PLTA 110 MW. Kegiatan pembangunan Jatigede Dam Project ini dibiayai melalui pinjaman (Loan), The Export-Import Bank of China senilai US\$ 239.573.036. investasi pembangunan Jatigede Dam Project ini telah dilakukan tiga kali pembebasan lahan. Yang pertama pada tahun 1982-1986 sebanyak 4.056 KK, kedua pada tahun 1994-1997 sebanyak 1.226 KK, ketiga pada tahun 2005-sekarang sebanyak 1.918 KK, dan kemudian pada tanggal 30 April 2007, dilaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan

konstruksi antara antara China Sinohydro Corporation Limited join with Consorsium of Indonesian Contractors (CIC), yaitu PT. WIKA (Wijaya Karya), PT. Waskita Karya, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Hutama Karya dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Waktu yang diberikan untuk pembangunan Jatigede Dam dari tanggal 15 November 2007 – 30 Desember 2013.⁷

Kedua, Tol Cisumdawu (Cileunyi/Bandung-Sumedang-Dawuan) seksi 2 sepanjang 10,1 km. Tol ini dibiayai oleh pendanaan dari pemerintah China. Pinjaman dari China senilai Rp3,60 triliun dialokasikan untuk jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Pada ruas itu, kontraktor China mengerjakan sekitar 6,30 km dari total 29 km porsi pemerintah. Perusahaan konsorsium Metallurgical Corporation of China Ltd, PT Wijaya Karya Tbk, PT Nindya Karya dan PT Waskita Karya Tbk. Mereka berbagi kontrak senilai Rp 3,48 triliun. Dalam proyek ruas tol Cisumdawu ini pemerintah telah menyepakati untuk mengerjakan 2 seksi yaitu seksi I Cileunyi-Rancakalong sepanjang 12,025 km dan seksi II Rancakalong-Sumedang sepanjang 17,35 km.⁸ Sementara itu, pada ruas Balikpapan-Samarinda, kontraktor China mengerjakan 11 km dari total 33 km porsi pemerintah di seksi V (Balikpapan-Bandara-Sepinggangan Balikpapan). Adapun, alokasi pinjamannya mencapai Rp 900 miliar. Konstruksi jalan tol Manado-Bitung juga menggunakan pinjaman China senilai Rp1,60 triliun. Kontraktor China mengerjakan 7 km dari total 14 km porsi pemerintah.⁹

Ketiga, adapun proyek di luar Jawa yaitu proyek pembangkit listrik hidro yang akan di-

⁷ Euodia Monica Sri Hadi, “Investasi China dalam bidang infrastruktur di Jawa Barat” *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013 dalam ejournal.hi.fisip.unmul.org

⁸ *Harian Kompas* “Konsorsium Perusahaan China BUMN Menangkan Lelang Proyek Tol Cisumdawu” dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/15/153242326/Konsorsium.Perusahaan.ChinaBUMN.Menangkan.Lelang.Proyek.Tol.Cisumdawu>, diakses pada tanggal 18 02 2018 pukul 10.32 WIB

⁹ Deandra Syarizka “\Bisnis Indonesia” 2013 dalam <http://koran.bisnis.com/read/20170201/449/624691/2> ruas tol ditugasi ke investor, diakses pada tanggal 18 02 2018 pukul 10.32 WIB

bangun di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Rencananya, proyek pembangkit listrik senilai US\$ 17,8 miliar ini akan memiliki kapasitas sebesar 6.080 megawatt (MW). Nota kesepahaman kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) proyek ini telah ditandatangani bersamaan dengan lawatan Presiden Jokowi saat Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) di Beijing pada November tahun lalu. Proyek tersebut akan dibangun oleh joint venture perusahaan China, Shanghai Electric Power Co. Ltd dan China Power Investment Corporation bersama mitra lokal PT Kayan Hydro Energy. Pembangunan itu diharapkan bisa mulai pada tahun 2016 dan rampung pada tahun 2024, dengan lima tahapan pembangunan.¹⁰

Indonesia-China berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara pertumbuhan berkelanjutan, stabil dan cepat, kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral ditingkatkan. Oleh karena itu, kerjasama kedua negara tersebut diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Pada bulan Maret 2012, sebagaimana telah disepakati dalam Pernyataan Bersama antara Republik Rakyat China dan Republik Indonesia, pemerintah China dan Indonesia setuju untuk mengembangkan Program Pengembangan Lima Tahun antara Indonesia China untuk Kerjasama di Bidang Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi 2013-2017 sesuai dengan Rencana Lima Tahun ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat China dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Republik Indonesia.

Menurut Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), China menyiratkan dana proyek-proyek infrastruktur di Indonesia antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer

(km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW). China juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta super cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta Surabaya dengan total dana sebesar US\$100Miliar sebagai modal investasi setelah Pemerintah Indonesia memberikan daftar proyek-proyek yang diperuntukkan bagi para investor China.¹¹

Perluasan kerjasama ekonomi antara Indonesia-China juga ditandai dengan adanya beberapa perjanjian kontrak kerjasama dan penandatanganan Memorandum of Understanding, dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Beijing bertemu dengan Presiden Xi Jinping untuk melakukan pembicaraan bilateral pada Maret 2015. Mengambil tema Kemitraan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk membawa Kemitraan Strategis Komprehensif dalam kerja nyata yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan China.

Fokus pembicaraan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping kali ini terkait upaya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, dan hubungan antar masyarakat. Secara khusus Presiden Joko Widodo mengundang pihak China untuk semakin meningkatkan arus investasi langsung di berbagai bidang ke Indonesia. Kedua presiden juga menyentuh isu kawasan yang menjadi perhatian bersama.

China yang mengalami kemajuan pesat di dalam pembangunan dan pertahanan dan keamanannya akan terus dimanfaatkan oleh Indonesia demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Posisi setara di dalam hubungan kedua negara mutlak diperlukan karena pada hakikatnya baik Indonesia maupun China adalah dua negara yang saling membutuhkan di dalam upaya mereka menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan.

¹⁰ Galih Gumelar, CNN Indonesia, "China Janjikan Investasi Rp1.361 Triliun di Infrastruktur RI" dalam http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150811161559_9271438/china_janjikan_investasi_rp1361_triliundi_infrastruktur_ri/, diakses pada tanggal 18 Februari 2018 pukul 10.37 WIB

¹¹ Jurnal Hubungan Internasional, "Konsep Bantuan Luar Negeri China ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing China)" Vol. 5 Edisi 1 APRIL 201, hlm. 58.

Jumlah Peningkatan Tenaga Kerja Asing China

Beberapa liputan tentang keberadaan tenaga kerja asing asal China di Indonesia dari media lokal dan Nasional:¹² Banten diprediksi mengalami kebanjiran tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 25 ribu orang yang mulai masuk sejak akhir 2015-2016, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi mencatat jumlah pekerja asing mencapai 664 orang, dari jumlah itu, baru sebanyak 256 pekerja asing telah memperpanjang izin tinggal dan bekerja. Sisanya belum melakukan pengajuan perpanjangan izin, TKA yang belum memperpanjang izin bekerja dan izin tinggal mencapai 408 orang, berasal dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Malaysia. Hampir 50 persennya TKA berasal dari China. Mereka mayoritas berasal dari garmen, kata Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Tatang Arifin. Mereka, kata Tatang, kebanyakan TKA asal China itu dipekerjakan di jabatan menengah, seperti ahli teknis.

Meskipun TKA asal China mendominasi di Kabupaten Sukabumi namun masa bekerja TKA asal China itu cukup singkat. Selain itu, masa kerjanya tidak bisa diperpanjang lagi. Untuk TKA asal China, Taiwan, dan India masa kerjanya dibatasi hanya enam bulan, tuturnya. (sule/win).¹³ Selama Januari hingga pekan ke-3 Juli 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memproses 5.044 kasus terkait tindakan administrasi keimigrasian (TAK). Dari jumlah itu, 2.856 orang asing berhasil dideportasi oleh pihak Imigrasi. Sedangkan dari 10 negara, warga negara China merupakan terbanyak yang melakukan pelanggaran TAK yaitu 1180 orang. Kemudian diikuti Afghanistan 411 orang, Bangladesh 172 orang, Filipina 151 orang dan Irak 127 orang. Dalam menghadapi perdagangan bebas, Pengawas ketenagakerjaan akan tetap mengacu kepada

regulasi yang mengatur tentang syarat dan kualifikasi mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Jika nanti ditemukan di lapangan bahwa TKA yang datang tidak memiliki izin, maka tidak akan segan untuk menindak pelanggaran tersebut,” kata Kepala Seksi (Kasie) Norma Kerja, Disnakertrans Provinsi Banten, Erwin Syafrudin, Jumat (11/9/2015).

Langkah tersebut dilakukan mengingat Banten juga memiliki angka pengangguran mencapai 480 ribu jiwa. Karena itu, tenaga kerja lokal asal Banten harus tetap dilindungi agar tidak terjadi ledakan pengangguran. “Hal ini dilakukan selain untuk menegakkan aturan ketenagakerjaan, juga dilakukan guna melindungi kesempatan kerja bagi para tenaga kerja lokal supaya mereka tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja,” ujar Erwin. Dirinya pun meminta agar pemerintah pusat bisa lebih teliti dalam menerbitkan tinggal atau izin bekerja bagi tenaga kerja asing. “Kepada para pengusaha yang hendak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing agar patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan seperti UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, maupun peraturan turunan lainnya,” tegas Erwin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Disnakertrans Provinsi Banten, sebanyak 25.200 orang TKA sedang mengurus izin kerja. Izin itu hanya berlaku selama satu tahun. Sehingga TKA di Banten akan mencapai angka 35 ribu jiwa. Dari 13 ribu perusahaan yang ada di Banten, tenaga kerja lokal berjumlah 1,3 juta jiwa. Hingga akhir agustus 2015, tercatat sebanyak 10 ribu jiwa TKA bekerja di Banten. Sedangkan berdasarkan data dari Kanwil Kumham Provinsi Banten, Dirjen Imigrasi mencatat jumlah tenaga kerja asing terbanyak berasal dari China sebanyak 2.809 orang, lalu Korsel 2.188, Jepang 48 orang, Taiwan 454 orang, Amerika 278 dan 2.000 lainnya dari beragam negara. (Yandhi D/Ahm). Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar didunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara kelima yang memiliki penduduk terbesar adalah Jepang. Indonesia dengan jumlah

¹² <http://bisnis.liputan6.com/read/2315208/banten-bakal-kebanjiran-tenaga-kerja-asing-saat-mea>

¹³ <http://bisnis.liputan6.com/read/2562359/ditjen-imigrasi-harus-bisa-cegah-serbuan-pekerjaChina-ke-ri>

penduduk 237.641.326 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia.

Di Gresik Jawa Timur¹⁴ sebagai daerah yang menyediakan diri sebagai titik pembangunan pelabuhan laut internasionalpun tidak luput dari limpahan tenaga kerja China. Gresik adalah salah satu daerah di antara berbagai daerah di Indonesia yang menjadi sasaran operasi beberapa perusahaan Penanaman Modal Asing. Sebagaimana diberitakan Dinaskertrans Gresik mengkonfirmasi keberadaan sekitar 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk dari China. Ironisnya fenomena melubernya tenaga kerja China tidak dibarengi dengan keberadaan regulasi daerah yang mengaturnya. Dengan kata lain limpahan TKA di Gresik yang masih mengikuti ketentuan dari Kemenakertrans RI pusat tidak membawa dampak positif apapun termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik.

Fenomena desakan implementasi kebijakan pusat kepada daerah dari kasus masuknya tenaga kerja di daerah termasuk Gresik semakin melengkapi kebijakan pusat menganulir seluruh perda-perda yang disinyalir menghambat jalannya investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rezim perdagangan bebas dunia nampaknya memposisikan Indonesia melalui tangan-tangan penguasanya untuk mau tidak mau menjalankan skenario kebijakan global yang diterjemahkan oleh Jokowi dalam bentuk Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia.

Sebuah kebijakan ibarat pedang bermata dua. Sisi satu matanya dalam bentuk kebijakan regulasi yang memberikan kran terbuka masuknya investasi asing dengan segala dalih dan rasionalisasi baik secara terbuka maupun sembunyi. Sisi lain dalam bentuk kebijakan represif yang disinyalir menciptakan hambatan berjalannya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Munculnya fenomena potensi disintegrasi Papua melalui tuntutan Papua Merdeka, pertemuan Ketua DPR RI Ade Komaruddin

dengan Dubes AS Robert Blake untuk memantapkan agenda revisi UU Terorisme, ujung kebijakan Tax Amnesty kemana mau diarahkan, pembaharuan UU Migas yang masih tarik ulur dan beragam kebijakan lain penuh kontroversi seolah-olah menggambarkan dua sisi pedang kebijakan di negeri ini.

Belum lama ini pada April 2016 lalu, 5 tenaga kerja China ditangkap TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma karena masuk kawasan Lanud Halim secara ilegal. Kabar datangnya wisman China di Bali dan lain-lain benar-benar menyisakan tanda tanya besar. Tidakkah ini semua cukup sebagai bukti bahwa kebijakan memberikan kran longgarnya limpahan tenaga kerja asing terutama China di Indonesia termasuk di Gresik akan berpotensi berbahaya. Karena secara factual sudah dipahami bahwa investasi asing adalah modus baru penjajahan untuk menciptakan ketergantungan semua bidang terutama politik dan ekonomi sebuah negara. Apalagi begitu beragamnya modus proxy war yang merupakan revolusi formula perang kekinian dari berbagai kekuatan baik berbentuk negara maupun Multi National Corporation. Amerika punya Kapitalis Liberalis, China memiliki Sosialis Komunis sebagai ideology ekspansi yang menggerakkan seluruh roda kekuatan politik dan ekonominya.

Kontroversi terkait Perubahan Aturan dalam Penanganan TKA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan salah satu cara untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan mempermudah dan memperjelas peraturan-peraturan ketenagakerjaan asing. Dimana perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri masih dalam proses pemulihan. Sehingga perlu adanya berbagai kebijakan guna menstabilkan kondisi ekonomi, salah satunya melakukan swastanisasi terhadap Badan Usaha Miliki Negara serta melakukan pinjaman luar negeri kepada IMF. Kebijakan swastanisasi terhadap BUMN memberikan iklim yang positif bagi investasi di Indonesia. Peningkatan investasi juga diikuti dengan permintaan TKA yang digunakan oleh investor

¹⁴ <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2016/07/17/97771/bahaya-laten-migrasi-buruh-china-ke-indonesia.html>

dalam proyeknya di Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan kemudahan bagi TKA masuk di Indonesia dan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.

Selanjutnya pemberlakuan UU Nomor 13 Tahun 2003 juga diikuti dengan Peraturan Presiden, Kebijakan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Namun di sisi lain, revisi Permenaker di tahun 2015 menimbulkan berbagai penolakan yang terkait dengan maraknya TKA ilegal asal China di Indonesia. Pengaturan Bahasa untuk TKA Isu lainnya yang menimbulkan perdebatan politik adalah mengenai penghapusan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA, yang merupakan upaya pemerintah untuk merangsang investor datang ke Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, bahwa Presiden Joko Widodo meminta secara spesifik kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengubah aturan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA¹⁵.

Selain itu, peraturan tersebut merupakan kontrol pemerintah atas tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia. Peraturan ini juga untuk menghargai budaya Indonesia. Selain itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mencurigai bahwa penghapusan aturan tersebut merupakan pesanan investor asing yang ingin proyek investasinya dikerjakan oleh pekerja mereka sendiri.¹⁶ Meski demikian, tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia akan menghambat arus investasi. Revisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia.

Syarat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing tidak dihilangkan total, namun hanya dihilangkan sebagai syarat masuk TKA ke Indonesia. Para pekerja asing yang telah aktif bekerja di Indonesia pasti akan belajar Bahasa Indonesia. Selain itu, Hanif Dhakir yakin kehadiran pekerja asing bukan ancaman bagi pekerja lokal. Dikarenakan tidak semua jabatan bisa diduduki oleh pekerja asing, hanya jabatan komisaris, direksi, atau jabatan dengan keahlian tertentu yang tidak dimiliki pekerja Indonesia. Namun, hal ini bertolak belakang dengan ungkapan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ketika awal tahun 2015 lalu, yang mengungkapkan masalah TKA yang tidak ingin belajar berbahasa Indonesia.

Sedangkan, Indonesia diminta melakukan pelatihan bahasa oleh negara lain kepada para TKI yang ingin bekerja di negara tujuan. Namun, negara lain tidak mewajibkan tenaga kerja yang bekerja di Indonesia belajar berbahasa Indonesia. Menurut Hanif Dhakiri, pemerintah akan membuat kemampuan bahasa Indonesia. Standarisasi kemampuan ini seperti standar TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) dalam kemampuan Bahasa Inggris. Dimana upaya ini untuk mencapai tujuan transfer keahlian dan pemahaman budaya di Indonesia. Selain itu, hal ini juga bertolak belakang dengan berbagai kasus TKA yang masuk ke Indonesia, khususnya dari China. Para TKA tidak bisa berbahasa Indonesia, dan tetap menggunakan Bahasa China untuk berkomunikasi dengan sesama rekan asal China. Salah satu contohnya yaitu pada 17 Januari 2017 di Jawa Timur, sebanyak 51 TKA asal China tidak bisa berbahasa Indonesia dalam sidang tim pengawasan orang asing dan Gubernur Jawa Timur Soekarno.

TKA asal China di perusahaan tersebut juga tidak melakukan transfer teknologi kepada pekerja lokal selama mereka berkerja. Kemudian, di Sumatera Utara pada proyek PLTU kawasan Paluh Kurau, kec. Hampan Perak yang merupakan proyek PT. Mabar Elektrindo Medan yang bekerjasama dengan Shanghai Electric Power mempekerjakan TKA asal

¹⁵ News.detik.com. (2015d, September 3). Menkum Yasonna Ungkap Alasan Banyaknya Pekerja China Masuk Indonesia. News.detik.com. Jakarta. Retrieved from <http://news.detik.com/berita/3009110/menkum-yasonnaungkap-alasan-banyaknya-pekerja-china-masuk-indonesia>

¹⁶ Kompas.com. (2016f, December 16). Jadi Konsultan Bisnis Timah Bangka Selatan, 2 Warga China Dideportasi. Kompas.com. Pangkalpinang. Retrieved from <http://regional.kompas.com/read/2016/12/16/18325131/jadi.konsultan.bisnis.timah.bangka.selatan.2.warga.china.dideportasi>

China illegal¹⁷. TKA asal China ini tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga menggunakan Bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan pekerja lokal. Selanjutnya, di Banten, wakil ketua DPR Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke perusahaan semen yaitu PT Cemindo Gemilang.

Beberapa TKA asal China yang ditemui dalam kunjungan tersebut tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Inggris. Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga melakukan kunjungan kerja ke Bali, terkait fenomena tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia. Kemudian, dalam kunjungannya ini diketahui para TKA asal China tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan, pengumuman dan instruksi menggunakan bahasa China.

Hal ini tentu menyulitkan tenaga kerja lokal yang hanya mampu berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Serta mengakibatkan kesulitan dalam *transfer knowledge*. Penggunaan berbahasa Indonesia bagi TKA di Indonesia merupakan kewajiban yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta". Tentu hal ini memberikan pemahaman bahwa suatu kegiatan dalam komunikasi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta wajib digunakan, termasuk pihak swasta yang bekerja di Indonesia. Kemudian, Permenaker 16 tahun 2015 ini telah bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bab III Pasal 44 tentang peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional. Dimana pemerintah bertujuan untuk meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan diberlakukannya peraturan Perme-

naker 16 tahun 2015 telah memperlambat tercapainya tujuan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional serta mengabaikan kewajiban Berbahasa Indonesia di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta. Sehingga pemerintah telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1 dan pasal 44.

Hal ini mengakibatkan kewajiban para pemberi TKA tidak melakukan transfer *knowledge* yang telah diwajibkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 45 ayat 1. Dalam Undang-Undang tersebut pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Dilain sisi, transfer knowledge ini dapat mudah dilakukan dengan menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua pihak yaitu pekerja lokal maupun pekerja asing. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus ditemukan TKA asal China tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sebagai Bahasa Internasional. Hal ini semakin mengkhawatirkan pekerja Indonesia terkait serbuan pekerja asing yang tidak memberikan manfaat pada Indonesia.

Penghapusan Rasio Tenaga Kerja Lokal; Alih Teknologi dan Transfer of Knowledge Isu lain yang juga menimbulkan perdebatan politik selanjutnya adalah mengenai dipersyaratkannya rasio serapan tenaga kerja lokal untuk setiap penggunaan tenaga asing. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri setelah diberlakukannya Permenaker Nomor 16 tahun 2015 pada 29 Juni 2015, hal ini diperlukan untuk menyerap tenaga kerja lokal, serta memudahkan alih teknologi dan transfer knowledge. Namun tiga bulan setelahnya, Presiden Jokowi malah meminta Kemenaker untuk menghapus berbagai peraturan yang dianggap menghambat investasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berlakunya Permenaker 35 tahun 2015 yang menghapus pasal 3 Permenaker 16 tahun 2015. Hal tersebut dikhawatirkan akan menghilangkan kesempatan terjadinya alih pengetahuan dan alih teknologi dari TKA ke tenaga kerja lokal.

¹⁷ Infoseputarsumut.com. (2017, January 6). TKA Asal China Dipekerjaan Di PLTU Dipertanyakan-Paluh Kurau Medan. Retrieved June 17, 2017, from <https://www.infoseputarsumut.com/2017/01/06/tka-asal-china-dipekerjaan-di-pltu-dipertanyakan>

SIMPULAN

Investasi asing asal China yang masuk ke Indonesia telah menimbulkan berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini mengonfirmasi simpulan yang didapat dari beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya bahwa investasi China ke dalam sebuah negara telah menimbulkan dinamika tersebut. Investasi asal China yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sebuah negara secara ekonomi, ternyata menimbulkan *domino effect* terhadap dinamika ekonomi, politik, dan juga sosial.

Secara lebih detail tampak dari timbulnya kontroversi kebijakan pemerintah yang terkesan tidak memiliki kedaulatan yang kuat ketika menghadapi kepentingan yang masuk melalui investasi China. Secara Sosial, dampak yang terjadi juga terlihat dari semakin membludaknya tenaga kerja asal China yang ikut masuk dengan menumpang proyek-proyek manufaktur dan infrastruktur milik para investor China. Masuknya para *unskilled workers* asal China tersebut telah menimbulkan masalah karena mereka merebut lapangan kerja dari para tenaga kerja lokal. Padahal para pekerja asal China tersebut adalah berkualifikasi pekerja kasar, bukannya tenaga kerja yang berkemampuan tinggi atau *skilled workers*. Disisi lain, masuknya para *unskilled workers* asal China tersebut juga dilakukan dengan cara-cara ilegal, yakni dengan memanipulasi status kualifikasi keahlian. Hal ini tampak dalam beberapa kasus ketika visa kerja para tenaga kerja tersebut diperiksa ternyata para pekerja kasar tersebut menyandang status sebagai *skilled workers*.

DAFTAR RUJUKAN

Jurnal Hubungan Internasional, “*Konsep Bantuan Luar Negeri China ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing China)*” Vol. 5 Edisi 1 APRIL 2011, Euodia Monica Sri Hadi, “*Investasi China dalam bidang infrastruktur di Jawa Barat*” Journal Ilmu Hubungan Internasional, 2013 dalam ejournal.hi.fisip.unmul.org

International Labour Office. (2007). *International Labour Standards on Migrant Workers’ Rights: Guide for Policymakers and Practitioners in Asia and the Pacific*. Bangkok: the International Labour Office United Nations. (2005).

The International Convention on Migrant Workers and its Committee (Vol. 24). Geneva.

Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Andyala Waluyo (Voa Indonesia), “*BUMN Indonesia, China Resmikan Kerjasama Pembangunan Kereta Cepat*” dalam <http://www.voaindonesia.com/a/konsorsium-bumn-indonesia-jalin-kerjasama-dengan-china-bangun-kereta-cepat/3009880.html>, diakses pada tanggal 20 02 2018 pukul 23.42 WIB

Aulia Natasya Irfani Ampri, *Bombardir Masuknya Tenaga Kerja Asing :Apakah kita siap?*-<http://bemfeui.com/offical/bombardir-masuknya-tenaga-kerja-asing-ke-indonesia-apakah-kita-siap/>, diakses 20 Februari 2018, pkl. 08.02 WIB

Deandra Syarizka “*Bisnis Indonesia*” 2013 dalam <http://koran.bisnis.com/read/20170201/449/624691/2-ruas-tol-ditugasi-ke-investor>, diakses pada tanggal 18 02 2018 pukul 10.32 WIB

Galih Gumelar, CNN Indonesia, “*China Janjikan Investasi Rp1.361 Triliun di Infrastruktur RI*” dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/201508111615599271438/chinajanjikan-investasi-rp1361-triliundi-infrastruktur-ri/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018 pukul 10.37WIB

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “*Disaksikan Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping, RI–RRT Tandatangani 8 Kerjasama*” dalam <http://setkab.go.id/presiden-rrt-xi-jinping-sambutpresiden-jokowi-dengan-upacara-kenegaraan/>, diakses pada tanggal 20 02 2018, pukul 01.08 WIB